PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DISTRIK BONGGO
KAMPUNG KIREN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

(RPJMK)

KAMPUNG KIREN

TAHUN 2021 - 2027

SARMI
MANDIRI DAN BERMARTABAT

JULI 2021

Disampaikan oleh :

PEMERINTAH KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO
KABUPATEN SARMI

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

DISTRIK BONGGO

KAMPUNG KIREN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

(RPJMK)

KAMPUNG KIREN

TAHUN 2021 - 2027

JULI 2021

Disampaikan oleh :

PEMERINTAH KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO
KABUPATEN SARMI

Kata Pengantar

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Kiren Distrik Bonggo ini telah dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kampung bersama-sama dengan para Pendamping Kampung Kiren dan Pendamping Distrik Bonggo walau dengan sedikit keterlambatan.

Dokumen RPJMK ini berisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung berdasarkan visi misi dan kebutuhan pembangunan Kampung yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para wakil/tokoh masyarakat serta dengan memperhatikan isu/permasalahan strategis dan kondisi Kampung. RPJMK juga merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat Kampung atas kebutuhan pembangunan Kampung selama jangka menengah (2021 - 2026).

Dalam rangka operasionalisasi dokumen RPJMK maka, diharapkan agar perbaikan-perbaikan yang diminta sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku maka program yang telah disepakati didalam pelaksanaan RPJMK ini akan dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak didalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Kampung.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang turut berperan aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam proses Review dokumen RPJMK ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Distrik Bonggo

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA DISTRIK BONGGO

FREDY SAWEFKOY. SIP M.AP
NIP.19760606 200212 1 019

Kata Pengantar

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi melalui Kepala Distrik Bonggo, yang telah menugaskan Tim Penyusun (instruktur) RPJMK kabupaten Sarmi bersama-sama dengan para Pendamping Desa /Kampung untuk membantu proses penyusunan dokumen RPJMK di Kampung Kiren dengan melibatkan para tokoh/wakil masyarakat kampung melalui serangkaian kegiatan musyawarah di tingkat kampung guna menggali informasi tentang potensi dan kondisi kampung serta identifikasi isu/permasalahan strategis yang ada di kampung sebagai dasar perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung.

Harapan kami agar rumusan program yang tertuang dalam dokumen RPJMK ini dijadikan sebagai acuan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sarmi didalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kampug Kiren.

Atas nama masyarakat Kampung Kiren kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Amien.

Kepala Kampung Kiren

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO

DAUD DANIEL SAMAI, S.Pi

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar Kepala Distrik Bonggo i
Kata Pengantar Kepala Kampung Kiren ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMK 1
1.3 Dasar Hukum 2
1.4 Metode dan Tahapan Proses PBM 2

BAB II PROFIL KAMPUNG 5
2.1 Gambaran Umum Wilayah 5
2.2 Sejarah dan Asal Usul Kampung 7
2.3 Kependudukan 8
2.4 Kondisi Sosial Budaya 10
2.5 Kondisi Ekonomi 15
2.6 Kondisi Sarana Prasarana 16
2.7 Kelembagaan Kampung 16
2.8 Kelembagaan Pemerintahan Kampung 18

BAB III VISI DAN MISI KAMPUNG 20
3.1 Penjelasan 20
3.2 Visi Kampung 20
3.3 Misi Kampung 21

BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN 22
4.1 Identifikasi Masalah 22
4.2 Analisis dan Alternatif Pemecahan Masalah 22
4.2.1 Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang - Pemerintahan Kampung 23
4.2.2 Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang - Pembangunan Kampung 23
4.2.3 Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung 25
4.2.4 Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang - Pemberdayaan Masyarakat Kampung 25

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 27
5.1 Program Jangka Menengah Kampung 27
5.2 Skala Prioritas Program Jangka Menengah Kampung ... 29

BAB VI PENUTUP 33

LAMPIRAN :
1. Daftar Panjang Masalah
2. Matriks RPJMK
3. Peta Kampung
4. Berita Acara Musrenbang 2021
5. Peraturan Kampung tentang RPJMK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan/kampung (RPJMK) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan/kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan UU NO.6 tahun 2014 , yang disusun dan dirumuskan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan/kampung bersama-sama dengan masyarakat. Proses penyusunan dokumen RPJMK sebenarnya bukan hal yang baru, namun dari hasil orientasi terhadap keberadaan dan efektifitasnya di seluruh wilayah menunjukan bahwa, dokumen RPJMK disusun dengan melibatkan masyarakat dan dipersiapkan oleh aparatur pemerintah.

RPJMK dikenal masyarakat dan fungsinya efektif sebagai dokumen perencanaan yang telah dibuat. Dokumen perencanaan jangka menengah,Pola perencanaan yang berlaku tidak diterapkan dan/atau diakomodir secara baik oleh para pengambil kebijakan. Hal ini perlu dikoreksi sebagai salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah. Program-program pembangunan yang disusun atau diusulkan tidak sesuai. Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka, pemerintah daerah sepakat untuk tidak kaku menyikapi hal tersebut dengan semangat otonomi daerah akan tetapi lebih mengedepankan fungsi dan efektifitas dokumen RPJMK sebagai orientasi utama ketimbang sekedar format-format isian program yang selama ini digunakan didalam penyusunan program-program pembangunan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan/kampung (RPJMK) disamping untuk mendukung implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Kampung juga dimaksudkan sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Sarmi sesuai dengan Undang Undang No. 6/2014 tentang Pemerintahan Kampung .

Proses penyusunan dokumen RPJMK dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM), yaitu mengikutsertakan segenap warga dan/atau kelompok-kelompok masyarakat tanpa pengecualian, secara langsung, sistematis, musyawarah, demokratis dan terbuka mulai dari identifikasi masalah, penggalian dan penilaian kebutuhan, penggalian potensi, penyusunan alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pada skala lokal.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Kampung (RPJMK) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data profil dan potensi kampung/Kampung yang digali dan disusun melalui pendekatan Perencanaan Bersama Masyarakat.
2. Tersusunnya dokumen RPJMK yang sesuai dengan potensi dan permasalahan kampung/Kampung untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan distrik dan sebagai acuan penyusunan rencana program pembangunan Kabupaten Sarmi selama periode 2021 – 2026.

3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan/kampung yang akan digunakan sebagai acuan didalam penyusunan program pembangunan tahunan Kelurahan/kampung selama 6 Tahun sesuai dngan UU no 6 tahun 2014.
4. Terlembagakannya proses penyusunan rencana pembangunan di tingkat Kelurahan/kampung secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Bersama Masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

- UUD 1945, Amandemen ke-2, Pasal 28F, Agustus 2000 tentang : Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.
- UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN
- UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No.6/2014 tentang Kampung
- PP No. 96/1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
- PP Nomor 43/2014 tentang pelaksanaan UU no 6 /2014
- PP Nomor 60/2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari APBN
- Permendagri No. 5/1998 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Propinsi dan Kabupaten
- Permendagri No.111/2014 tentang pedoman teknis peraturan Kampung
- Permendagri No.112/2014 tentang pemilihan kepala Kampung
- Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan Kampung
- Permendagri No.114/2014 tentang pedoman pembangunan Kampung
- Permendes No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.4. Metode dan Tahapan Proses PBM

1.4.1. Pendahuluan

Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) adalah suatu model perencanaan pembangunan pada tingkat komunitas (masyarakat lokal tingkat kampung/Kelurahan) yang melibatkan segenap warga dan/atau kelompok-kelompok masyarakat tanpa pengecualian, secara langsung, sistematis, musyawarah, demokratis dan terbuka mulai dari proses identifikasi masalah, penggalian dan penilaian kebutuhan, penyusunan alternatif pemecahan masalah, penggalian dan pemetaan potensi, serta pengambilan keputusan pada skala lokal.

Sebagai sebuah model, PBM memiliki prinsip-prinsip dan metode dalam upaya menuju perbaikan kualitas peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. PBM sebagai sebuah mekanisme, bukanlah sesuatu yang baku, tetapi tetap terbuka terhadap perbaikan-perbaikan demi penyempurnaan penggalian masalah dan identifikasi kebutuhan pada skala lokal. PBM juga merupakan cara untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, dari hanya sebagai objek menjadi sebagai pengambil peran dalam proses pengambilan keputusan.

1.4.2 Metode PBM

Pelaksanaan PBM dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk penggalian masalah dan pemahaman kondisi kampung untuk menyusun kegiatan-kegiatan di kampung/ Kampung berbasis kepada masalah hasil temuan PRA.

Penerapan kedua metode ini dilakukan dengan cara terbuka, selektif, berulang-ulang untuk penggalian informasi, disamping mencoba menggali informasi dengan sumber dan cara yang beragam.

1.4.3 Tahapan Proses PBM

Tahapan kegiatan menyeluruh dalam rangka proses perencanaan bersama masyarakat diawali dengan pemilihan dan penetapan kader/fasilitator PBM yang disebut sebagai Pendamping Desa /Kampung (PD). Para Pendamping ini diharapkan bisa melakukan fungsi pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan seluruh rangkaian proses PBM.

Adapun tahap-tahap PBM selanjutnya dalam rangka penyusunan dokumen RPJMK adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Pendamping Lokal Desa/Kampung,Pendamping Desa (PLD,PD)dan Aparat Kampung
2. Penyusunan data profil kampung
3. Penelusuran Alur Sejarah Kampung
4. Pembuatan Peta Kampung
5. Analisis Bagan Kelembagaan Kampung
6. Identifikasi masalah dan perumusan alternatif pemecahan masalah
7. Musyawarah tingkat Kampung
8. Penyusunan dan legalisasi dokumen RPJMK

DAUR PROSES PERENCANAAN BERSAMA MASYARAKAT
PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMK

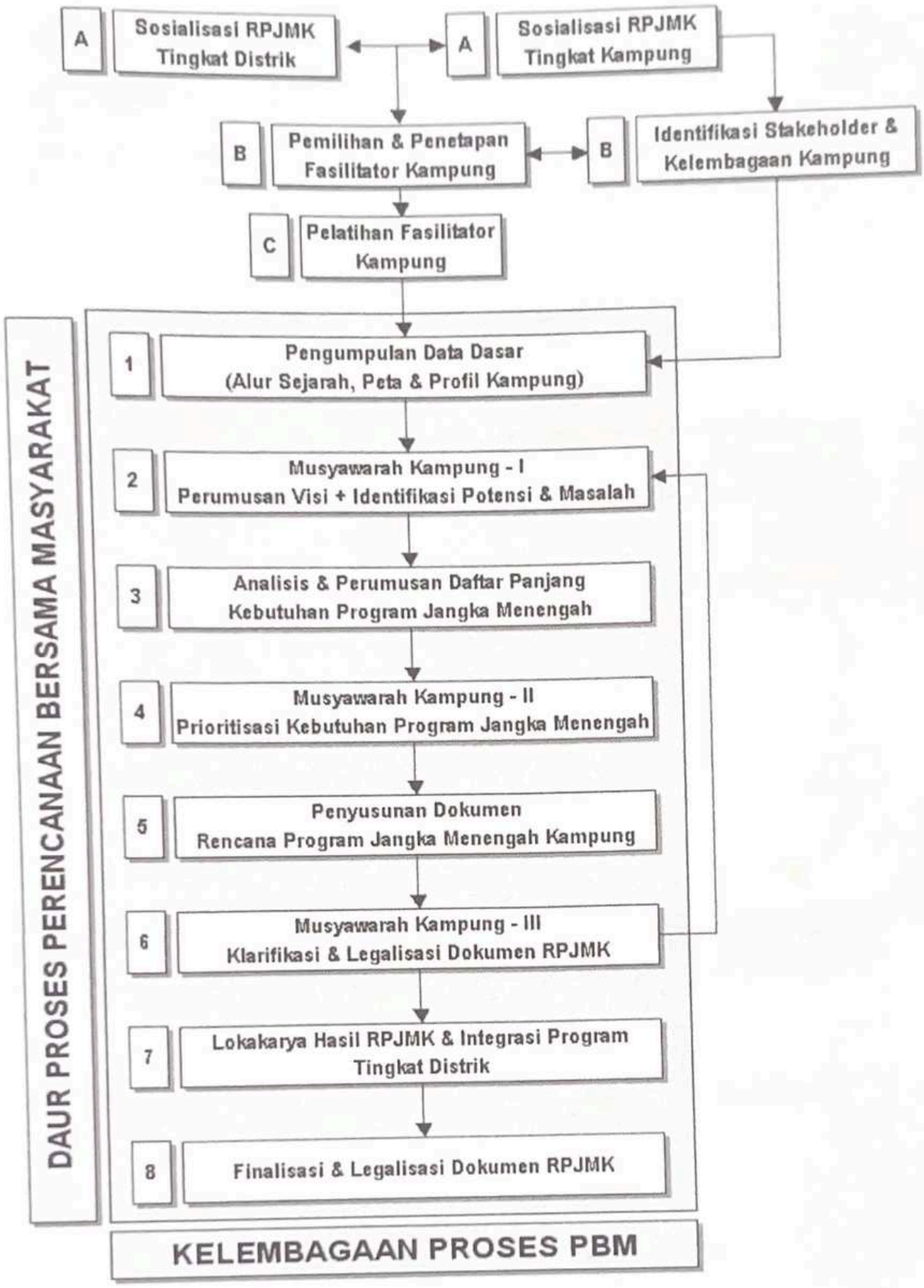

BAB II

PROFIL KAMPUNG

2.1 Gambaran Umum Wilayah

2.1.1 Batas-Batas Administrasi

Kampung Kiren merupakan salah satu dari 5 kampung yang termasuk dalam wilayah administrative Distrik Bonggo – Kabupaten Sarmi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Narum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tetom
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Srum
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Armopa

Kampung Kiren terletak disebelah timur Kota sarmi dengan jarak sekitar 128 km yang dapat dicapai Dalam Waktu 4 Jam dari sarmi dengan kendaraan Roda dua atau roda empat Dan 5 menit Dari kantor distrik Bonggo dengan Menggunakan kendaraan roda dua

Gambaran secara menyeluruh mengenai sketsa peta wilayah Kampung Kiren seperti ditunjukkan pada Gambar-2.1

2.1.2. Luas Wilayah

Keadaan Luas Wilayah dirinci :

- Luas Wilayah keseluruhan ± 4 km2
- -.Pemukiman : 112,5 Ha
  -.Ladang/tegalan : 112,5 ha

No	Obyek	Luas	Keterangan
1. PEMUKIMAN DAN BANGUNAN			
1.1	Umum		
1.2	Tempat Ibadah	4 unit	**Kondisi baik**
1.3	Jalan Kampung	2.000 m	
1.4	Pasar Kampung	2	
1.5	Pendidikan (Sekolah TK/PAUD, SD	1 unit	
	SLTP	-	
1.6	Kantor Kepala Kampung	1 unit	

1.7	Lapangan Bola Kaki	1	
1.8	Lapangan Volly	-	
1.9	Polindes	-	
1.10	Dermaga/Pelabuhan	-	
1.11	Perpustakaan Kampung	-	
1.12	Rumah Guru	-	
2. PERTANIAN			
2.1	Kebun Tradisional	-	
2.2	Lahan Tidur/Tanah Hutan	-	
2.3	Kakao/Coklat	2 ha	
2.4	Dusun Sagu	-	
2.5	Lahan Perkebunan	50 ha	
2.6	Hutan Lindung	-	
2.7	Lahan sawah	-	
3. RAWA			
3.1	Rawa produktif	--	
3.2	Rawa non Produktif	--	

Sumber Data : Pemerintah Kampung Kiren

2.2 Sejarah dan Asal Usul Kampung

Kampung Kiren terbentuk dari serangkaian kejadian dan peristiwa-peristiwa masa lalu seperti tercatat dalam dokumen kampung maupun berdasarkan informasi/catatan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Rincian kejadian dan/atau peristiwa seputar terbentuknya Kampung Kiren secara lengkap seperti disajikan pada tabel berikut yang memuat rekaman kejadian dan/atau peristiwa dimaksud.

Tabel Alur Sejarah Ringkas Kampung Kiren

Tahun	Rekaman Kejadian
1994	Pada tahun ini lokasi mulai dibuka untuk persiapan penempatan Trans lokal
1995	Setelah dibuka lokasi Trans Lokal mulai menempati wilayah pada tanggal 18 April 1995, dilanjutkan penempatan trans umum: 1. Penempatan pertama dari Jawa Barat

Tahun	Rekaman Kejadian
	2. Penempatan Kedua dari Nusa Tenggara Barat 3. Penempatan Ketiga dari Jawa Timur 4. Penempatan keempat dari Bali Pada saat itu dibina oleh Pimpinan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) Bapak Jhon Moniung dari tahun 1996-1997
1997	Pada tahun ini tebentuklah menjadi Satuan Permukiman Armopa 1 (SP I) yang dipimpin oleh Kepala Desa Drs. Muhamad Hamim yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2002
2002	Pada tahun ini SP I dipimpin oleh Kepala Desa Syukri, B.A sampai dengan tahun 2007
2007	Nama Kampung diganti menjadi Kampung Kiren dan dipimpin oleh Bapak Barens Honis sampai dengan tahun 2021
2021	Pada tahun ini Kampung Kiren telah di pimpin oleh Kepala Kampung Terpilih Daud Daniel Samai, S.Pi

2.3. Kependudukan.

2.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Kiren pada tahun 2021 tercatat sebanyak 817 jiwa dengan 252 Kepala Keluarga (KK) .

JUMLAH PENDUDUK KAMPUNG KIREN

NO	RW	LUAS (KM2)	PENDUDUK			KEPADATAN PENDUDUK
			LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	01	2.000 X 400	203	190	393	
2	02	2.000 X 200	106	110	216	
3	03	2.000 X 400	102	106	208	
	JUMLAH		411	406	817	

Sumber Data Kantor Kampung Kiren

PENDUDUK MENURUT USIA

USIA	PENDUDUK			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
0 – 5	33	45	78	
6 – 10	36	37	73	
11 - 15	37	32	69	
16 – 20	29	31	60	
21 – 25	37	40	77	
26 – 30	45	35	80	
31-35	29	29	58	
36-40	36	30	66	
41-45	23	24	47	
46-50	24	29	53	
51-55	24	23	47	
56-60	19	14	33	
61-65	13	12	25	
66-70	15	11	26	
71+	11	14	25	
JUMLAH	**411**	**406**	**817**	

Sumber Data: Pemerintah Kampung Kiren

2.3.2. Mata Pencaharian Penduduk

Pada umumnya mata pencaharian utama penduduk kampung Kiren adalah petani dan nelayan . Pada umumnya Petani di kampung Kiren adalah petani tradisional karena mereka bertani di ladang dengan menggunakan alat-alat sederhana dan juga mencari ikan di laut. Karena itu banyak waktu yang dipakai untuk berladang dengan menanam berbagai jenis tanaman, umbi-umbian, buah-buahan dan lain-lain.

Pola bercocok tanam masyarakat kampung Kiren adalah pola gilir balik dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya setelah lahan dibabat kemudian dibiarkan beberapa waktu untuk menjadi kering dan dibakar, setelah dibakar barulah akan ditanami berbagai jenis tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran. Pola gilir balik atau berpindah sebagaimana dimaksud adalah suatu cara sederhana mengembalikan kesuburan tanah, menjaga ekologi dan ekosistem pada tempat kelola tadi. Karena itu setelah bekas lahan kebun tadi dibiarkan kurang lebih tiga sampai empat tahun dan menjadi hutan sekunder, mereka akan kembali membuka lahan di tempat itu.

Sistim ini telah dilakukan sejak dulu dan sampai sekarang masih digunakan. Memiliki tata ruang adat dengan sistim pembagian dan peruntukan lahan dalam pengelolaan mulai dari tengah laut sampai ke puncak gunung puncak perbukitan sesuai fungsinya.

Kenyataan ini semakin terancam kerusakannya akibat adanya intervensi pihak luar dalam pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya tanpa pernah mendukung nilai-nilai local untuk perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsi dan kondisi obyektif lingkungan.

Untuk lebih jelasnya mata pencaharian masyarakat Kiren dapat dilihat pada tabel berikut.

2.4. Kondisi Sosial Budaya.

2.4.1. Kepemimpinan Kelembagaan Adat

Sistim kepemimpinan Adat Kampung Kiren merupakan sistim kepemimpinan kolektif yang dipimpin oleh seorang kepala suku dari garis keturunan yang tertua. Secara umum sistim kepemimpinan kepala suku sebagaimana dimaksud didasarkan pada garis keturunan dengan hak utama melekat pada hak kesulungan. Karena itu setiap anak tertua dalam garis keturunan memiliki hak waris atas jabatan keondoafian pada masyarakat Kiren

Sebagaimana dikatakan bahwa kepemimpinan kepala suku keondoafian memiliki hak veto terhadap segala hal, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan dan kesejahteraan kampung. Karena itu akan menjadi semakin strategis apabila dalam segala hal peran para tokoh adat harus dilibatkan atau difungsikan karena konsep tiga tunggu yang selama ini juga belum berjalan secara efektif. Dari kenyataan yang ada para tokoh adat belum berperan secara aktif karena mereka kurang diajak untuk duduk dalam satu wadah dan memberikan ruang bagi mereka dan bicara tentang apa yang mereka harapkan. Hampir di semua kampung terjadi dualisme kepemimpinan yang mengakibatkan terjadinya konflik internal karena kurang adanya kesepahaman diantara kedua belah pihak, adat dan pemerintah dengan (pengelola) program/proyek.

BAGAN

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT KAMPUNG KIREN

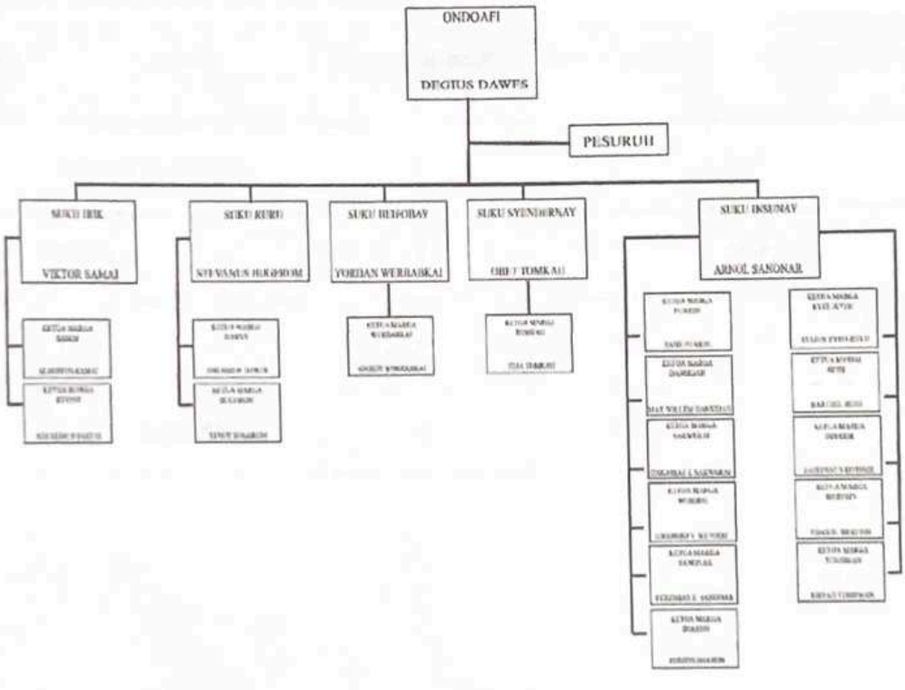

2.4.2. Agama dan kepercayaan yang dianut

Agama merupakan bagian dari kehidupan iman yang secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi terbentuknya jati diri seseorang. Masyarakat di kampung Kiren mengenal agama Kristen sejak awal tahun 1933-an. Dan sampai dengan saat ini terus berkembang mengikuti perkembangan yang sementara terjadi. Di kampung Kiren ada tiga agama yang dianut dengan jumlah penganut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah penduduk dan Agama yang dianut adalah sebagai berikut :

NO	Dusun/ RT	KRISTEN PROTESTAN						KHA-TOLIK	IS-LAM	HIN-DU	BU-DHA
		GKI	GBI	GKII	ADV	GIDI	JUM-LAH				
1	Kiren	279	-	-	-	-	279	17	517	5	-
JUMLAH		**279**						**17**	**517**	**5**	**-**

Permasalahan umum yang dialami adalah kurangnya program pembinaan bagi pengurus gereja (Majelis Jemaat dan Badan Pelayan Unsur), Pengurus Masjid dan Pengurus Pura dari Klasis, MUI serta dari Kementrian Agama. Serta kurang tersedianya dana-dana pembinaan pada denominasi gereja, Masjid dan Pura masing-masing sehingga kebanyakan anak-anak usia dini dan remaja kurang mendapat pembinaan sehingga banyak yang terpengaruhi dalam hal-hal yang bersifat negative. Terutama anak-anak yang melanjutkan pendidikan keluar kampung karena kurang adanya perhatian dari orang tua.

Jumlah Rohaniawan dan Rumah Ibadah

No	Agama	Rumah Ibadah	Rohaniawan	Keterangan
1	Kristen protestan	1	2	Aktif
2	Islam	1	2	Aktif
3	Hindu	1	1	Aktif
	JUMLAH	4	5	

2.4.3. Pendidikan

Lembaga Pendidikan yang ada di Kampung Kiren :

JUMLAH RUANG KELAS, KELAS DAN GURU

No	Sekolah	Jumlah			Keterangan
		R. Kelas	Kelas	Guru	
1.	PAUD	1	1	5	
2	SD	6	6	8	
	JUMLAH	**7**	**7**	**16**	

Penduduk kampung Kiren dilihat dari presentase jumlah pendidikan yang ditamatkan, maka hampir seluruh penduduk kampung telah menamatkan pendidikan. Hanya ada perbedaan jumlah pada tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jumlah penduduk kampung yang telah menamatkan pendidikan hanya setingkat SD/ sederajat jauh lebih banyak atau sekitar 50 %, yang diikuti SLTP dan SLTA. Dilihat dari keberadaan SDM yang ada di kampung Kiren maka sangat mendukung dalam berbagai aspek pembangunan. Data secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :

Menurut Pendidikan yang ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak Tamat SD	230 org	
2	SD/ sederajat	275 org	
3	SLTP	90 org	
4	SLTA/ SMK	122 org	
5	SMK	30 org	
6	DI/ DII	-	
7	DIII	15 org	
8	Sarjana (S1)	20 org	
9	Magister (S2)	1 org	
	Jumlah	779	

22.4.4. Kesehatan

Lembaga kesehatan di kampung Kiren belum ada, baik pustu, polindes atau pos syandu sehingga sangat jarang atau kurang adanya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dari distrik juga tidak ada jadwal yang tetap sehingga terpaksa masyarakat pergi berobat ke Bonggo atau Sarmi . Kondisi ini sangat menggangu karena sulitnya transportasi apalagi pada saat musim hujan, angin dan ombak. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya pustu dengan ditempatkan seorang tenaga medis yang menetap di kampung.

Kebanyakan masyarakat hidup sesuai dengan tradisi dan dianggap cukup layak, namun sesuai perkembangan kondisi ini turut mempengaruhi kesehatan. Banyak dampak yang muncul akibat kehidupan yang tidak teratur dan ini sangat tergantung kepada pengetahuan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu ada penyuluhan tentang kesehatan lingkungan social yang sangat mungkin berdampak pada kesehatan manusia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat pemerintah kampung dan Pendamping kampung Kiren kalaupun memang tidak memiliki jumlah data penderita secara akurat tetapi penderita penyakit yang paling sering ditemui adalah sebagai berikut :

10 Besar Penyakit Yang Diderita oleh Semua Golongan Umur

No	Jenis Penyakit	Jumlah	%
1	Malaria	20	
2	Asma	1	
3	Batuk pilek	24	
4	Mencret	7	
5	Kurang Gizi	3	
6	Penyakit Kulit	5	
7.	TBC	-	
	JUMLAH	**60 org**	

**Informasi PD : Pemerintah Kampung Kiren*

10 Besar Penyakit Yang Diderita golongan umur 0 – 4 Tahun

No	Jenis Penyakit	Jumlah	%
1	Malaria	16	
2	Asma	-	

3	Batuk pilek	14	
4	Mencret	6	
5	Kurang Gizi	-	
6	Kudis	-	
7	TBC	-	
	JUMLAH	**36**	

**Informasi FK : Kampung Kiren*

2.5. Kondisi Ekonomi

Ditinjau dari letak geografis, kampung Kiren sangat strategis untuk pengembangan beberapa komoditi unggulan dibidang perkebunan. seperti kakao dan kelapa. Disamping itu karena letak kampung Kiren juga di pesisir maka perlu juga pengembangan dibidang usana perikanan laut maupun darat. Sampai sejauh ini usaha dibidang pertanian berupa tanaman kakao sudan membuahkan hasil dimana sebagian masyaraka mulai menjual hasilnya ke pasaran.

Usaha perkebunan kakao dan pinang cukup bagus narnun ada banyak kendala yang dihadapi. antara lain soal peluang pasar dan harga pasaran yang tidak stabil karena lebih banyak dikendaiikan oleh para tengkulak. Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh petugas PPL mengakibatkan sulitnya masyarakat mengembangkan usaha di bidang pertanian maupun perkebunan. Belum pernah ada penyuluhan atau pelatihan bagi masyarakat di bidang perkebunan, pertanian maupun perikanan sehingga masyarakat masih menggunakan pola-pola pengelolaan maupun penangkapan ikan secara tradisional.

Begitu jauhnya letak kampung dengan pusat-pusat pemasaran,mengakibatkan pengeluaran biaya transportasi jauh lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Belum ada tindakan alternatif untuk membuka jalan darat semakin menambah beban pada musim angin dan ombak karena lintas laut juga tidak bisa dilalui.

Ada upaya alternatif yang dikembangkan dalam pengembangan usaha ekonomi dengan membuka koperasi unit kampung tetapi tidak berjalan baik akibat kurangnya pengetahuan yang baik tentang sistim pengelolaan manajemen. Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan tidak bisa berkembang dengan baik dan memberikan dampak perubahan ekonomi rakyat akibat tidak tersedianya bibit unggul. Berfungsinya aktivitas pasar mini di kampung tetapi tidak didukung oleh sarana yang memadai sehingga pada saat hujan selalu menjadi kendala atau tidak berjalan.

Kurangnya sarana perikanan seperti jaring, pancing serta sarana pengawetan ikan membuat masyarakat kurang menekuni mata pencaharian sebagai nelayan. Musim

angin dan ombak juga sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan sehingga lebih banyak masyarakat lebih mengembangkan usaha pertanian dan atau perkebunan.

2.6 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi rumah penduduk secara umum digolongkan dalam beberapa tipe, ada yang masih sederhana bukan permanen, ada semi permanen dan ada yang permanen. Dari keseluruhan yang ada di dalam satu rumah ada ditemui dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga. Kondisi kampung berada di pinggir pantai sehingga mulai terjadi pengikisan atau abrasipantai. Kondisi ini harus diantisipasi lebih awal karena lama kelamaan akan terjadi krusakan yang lebih serius.

Pendidikan sekolah dasar berjalan baik hanya saja ada beberapa kendala mendasar yang turut mempengaruhi aktivitas belajar mengajar. Diantaranya adalah kurangnya tenaga guru yang disebabkan oleh belum adanya rumah guru sehingga tidak bisa menetap kemudian kembali ke kota. Disamping itu sarana belajar mengajar tidak memenuhi standar kurikulum belajar karena banyak buku-buku paket yang tidak ada.

Aktivitas kerohanian berjalan cukup baik hanya ada kendala dimana ada kerusakan bangunan akibat termakan waktu. Sarana perumahan pastori ada tetapi sampai sejauh ini para pelayan jemaat atau pastori tidak menetap di kampung.

Sementara sudah ada sarana jalan darat walaupun belum dibuat secara baik. Ketersediaan sarana dan prasrana umum berupa MCK juga belum memadai sehingga perlu diperhatikan dalam pembuatannya..

2.7. Kelembagaan Kampung

Pembentukan masing-masing organisasi atau lembaga tersebut dibedakan atas : (i) organisasi/lembaga yang dibentuk atas inisiatif murni masyarakat guna memenuhi kepentingan masyarakat, (ii) organisasi/lembaga yang muncul dan tumbuh atas inisiatif masyarakat dan didukung secara operasional dan finansial oleh 'pihak luar', dan (iii) organisasi/lembaga yang merupakan bentukan 'pihak luar' yang inisiatif pembentukan tidak berasal dari masyarakat.

Bagan hubungan kelembagaan yang ada di Kampung Kiren digambarkan dalam diagram Venn berikut, yang difokuskan pada kajian hubungan antar lembaga tingkat lokal (kampung) untuk menunjukan besarnya manfaat, pengaruh dan dekatnya hubungan masing-masing organisasi/lembaga tersebut dengan masyarakat.

Lembaga Adat, Gereja dan Pemerintah Kampung merupakan tiga lembaga yang mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat Kiren , sebab ketiga lembaga ini memiliki kekuatan-kekuatan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat kampung serta memiliki andil yang besar memberi kehidupan, mengayomi dan mempersatukan masyarakat. Lembaga-lembaga lain seperti Pendidikan , Posyandu, Bamuskam, juga telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan keterbatasan yang ada. Lembaga lain lebih banyak bersifat situasional ketika ada program dari luar.

Terdapat kurang lebih 10 lembaga/organisasi di Kampung Kiren

1. Pemerintah Kampung
2. Lembaga Gereja
3. Lembaga Adat
4. Bamuskam
5. SD ,SM
6. Pemerintah Distrik
7. Dinas Kesehatan.

Bagan Hubungan Kelembagaan Yang Ada Di Kampung Kiren



Keberadaan lembaga-lembaga yang ada di kampung sebagaimana digambarkan di atas apabila ditinjau dari pemilikan kantor atau sekretariat, struktur organisasi dan program tertulis lembaga dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

NO.	NAMA LEMBAGA	ADA/ TIDAK			Dampak/ Pengaruhnya Terhadap Masyarakat
		KANTOR	STRUKTUR	PROG. TERTULIS	
I. LEMBAGA DALAM KAMPUNG					
1	Pemerintah Kampung	ada	ada	ada	baik
2	Bamuskam	Tidak ada	ada	ada	baik
3	Lembaga Adat	Tidak ada	ada	ada	baik
4	Gereja	ada	ada	ada	baik
5.	Sekolah	ada	ada	ada	baik
6.	Masjid	ada	ada	ada	baik
LEMBAGA LUAR KAMPUNG					

1.	Pemerintah Distrik	ada	ada	ada	baik
2.	Dinas Kesehatan	Tidak ada	ada	ada	baik
3.					

Sumber Data : Hasil Penggalian Kebutuhan difasilitasi oleh Fasilitator Kampung Kiren

2.8. Kelembagaan Pemerintahan Kampung

2.8.1. Lembaga Pemerintahan Kampung

Pemerintahan Kampung Kiren yang ada adalah hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2021. Pemerintahan Kampung Kiren dibentuk mengacu pada UU nomor 32/2004 terdiri dari Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) . Struktur Pemerintah Kampung terdiri dari seorang Kepala Kampung dan Sekretaris dilengkapi dengan beberapa kaur /bidang antara lain : Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum.

2.8.2. Lembaga Badan Musyawarah Kampung

Struktur Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota, pembentukannya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat Kampung Kiren pada tahun 2021.

Tugas dan fungsi Bamuskam lebih banyak difokuskan untuk mengawasi jalannya pemerintah kampung sesuai dengan keputusan bersama/amanat masyarakat kampung melalui musyawarah termasuk perencanaan kampung yang disusun secara partisipatif, membuat peraturan-peraturan kampung, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta memintah pertanggung jawaban kepala kampung secara periodik bahkan sewaktu-waktu.

Pada perjalanannya Lembaga ini tidak berjalan dengan baik, karena tugas dan fungsinya tidak jelas .

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kiren

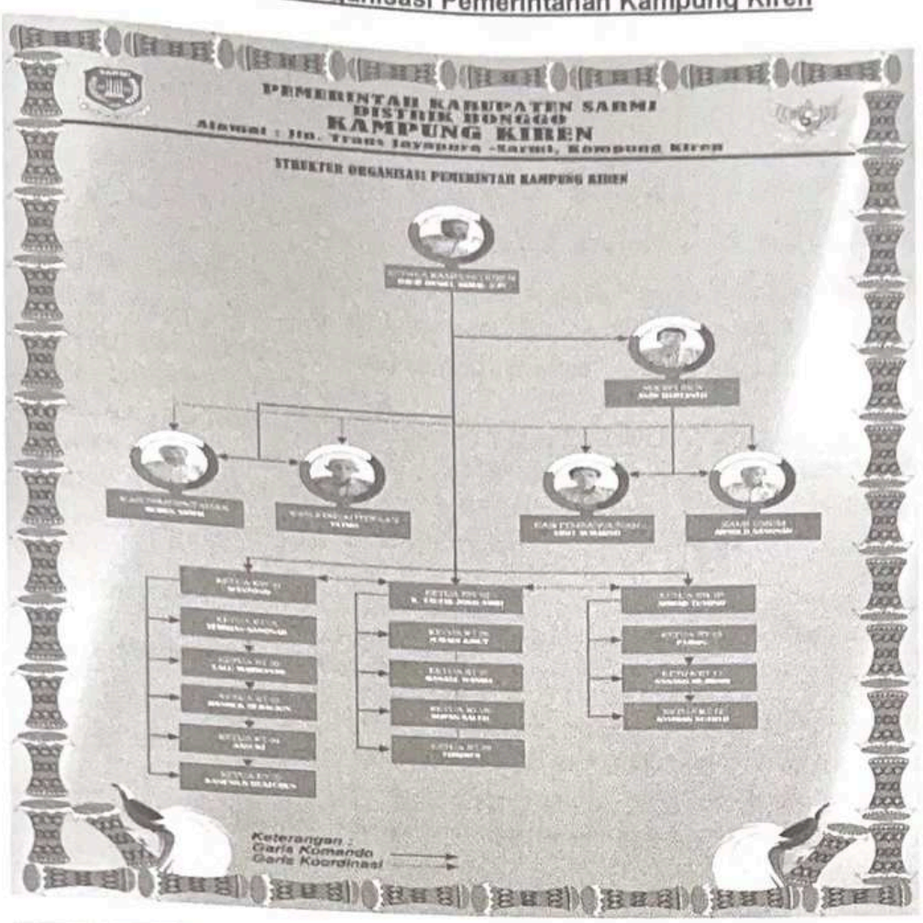

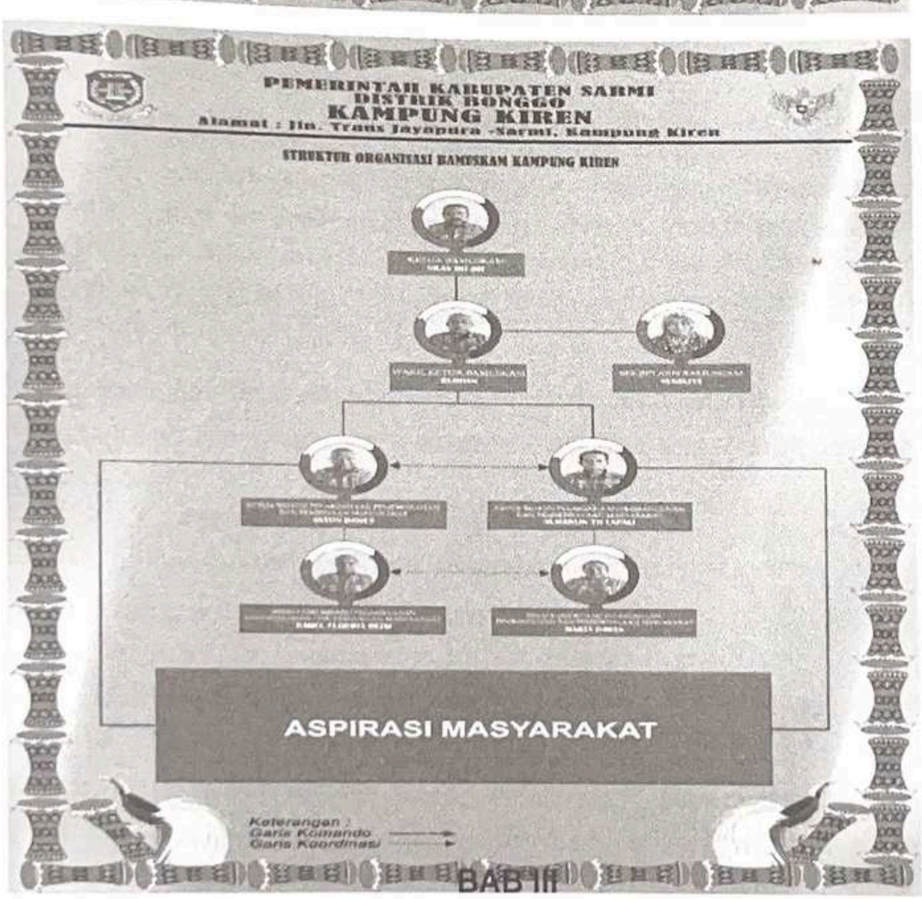

BAB II

VISI DAN MISI KAMPUNG KIREN

3.1 Penjelasan

Untuk memberi arah perencanaan pembangunan di tingkat kampung, diperlukan kesatuan visi kampung yang dirumuskan secara partisipatif sehingga mampu menjadi semacam roh pembangunan, yang memberi semangat dan perekat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Visi merupakan pernyataan cita-cita untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Visi juga mencerminkan kepribadian dan komitmen masyarakat kampung beserta aparaturnya dalam rangka membangun dan mengembangkan kampungnya.

Dalam kaitannya dengan penyusunan dokumen RPJMK, secara sederhana visi diartikan sebagai keinginan dan harapan masyarakat kampung dalam jangka waktu enam tahun atau sepuluh tahun ke depan.

3.2 Visi Kampung

3.2.1. Proses Perumusan Visi

Proses perumusan visi kampung diawali dengan penetapan norma atau prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan sebagai pemandu/tata nilai atau rujukan dari cita-cita yang dibuat. Norma merupakan mandat yang diberikan masyarakat untuk mensukseskan cita-cita bersama melalui kelembagaan kampung yang ada seperti Bamuskam, dan Kepala Kampung dengan peran aktif kelompok-kelompok masyarakat yang ada di kampung. Tata Nilai adalah rambu-rambu yang dapat membatasi perilaku, peran dan etika masyarakat kampung. Tata nilai merupakan faktor kunci kesuksesan dari visi yang ingin diwujudkan.

Langkah berikutnya adalah menentukan ukuran keberhasilan yang dicapai enam tahun atau sepuluh tahun ke depan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada berbagai aspek yang ingin dicapai. Proses pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada para stakeholder di kampung dilakukan dengan menggunakan form isian yang dibagikan melalui forum pertemuan warga dan/atau diskusi kelompok-kelompok masyarakat kampung.

Rumusan Visi Kampung Kiren mengacu pada pernyataan berikut ini :

1. Kehidupan antar umat beragama yang diharapkan enam tahun mendatang adalah:
   - Adanya kesadaran masyarakat terhadap suatu kehidupan yang rukun dan damai dengan tingkat toleransi yang tinggi antar sesama umat.
2. Keadaan Sarana dan Prasarana yang diharapkan enam tahun mendatang adalah:
   - Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan ekonomi, sosial budaya yang lebih baik.
3. Kondisi Perekonomian yang diharapkan enam tahun mendatang adalah :
   - Meningkatnya pendapatan dari berbagai sumber usaha ekonomi rakyat menuju kesejahteraan.

4. Hubungan Antar Kampung yang diharpkan enam tahun mendatang adalah :
   - Semakin eratnya hubungan yang mendukung kerjasama yang tinggi.
5. Bidang Pendidikan yang diharapkan enam tahun mendatang adalah :
   - Terciptanya SDM yang berkualitas, dinamis, kreatif.
6. Kebersamaan Masyarakat Kampung yang diharapkan enam tahun mendatang adalah:
   - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap suatu kehidupan yang rukun.
7. Hubungan Antara Pemerintah dengan Masyarakat yang diharapkan enam tahun mendatang adalah:
   - Ada peningkatan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan kampung.

3.2.2. Visi Kampung

Visi Kampung Kiren untuk jangka waktu enam tahun ke depan adalah dengan terbangunnya sarana dan prasarana kampung serta pengembangan ekonomi rakyat yang memadai maka diharapkan :

" BERSAMA MEMBANGUN KAMPUNG KIREN MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL "

3.3 Misi Kampung

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan kampung yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama Masyarakat dan kelembagaan kampung menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama Masyarakat dan kelembagaan kampung dalam mewujudkan kampung Kiren yang aman,tentram dan damai
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan kampung memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat

BAB IV

IDENTIFIKASI MASALAH DAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

4.1. Identifikasi Masalah

Salah satu maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMK adalah membantu dan memacu masyarakat untuk menemu-kenali dan memecahkan masalah yang ada atau dialami oleh masyarakat kampung secara partisipatif sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dan yang dimiilki oleh komunitas masyarakat kampung itu.

Sangat banyak masalah yang ada di tingkat masyarakat yang jarang sekali dipahami sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan. Kegagalan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat setidaknya berawal dari identifikasi dan kajian yang jarang digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pembangunan. Terdapat sejumlah masalah utama yang ada di Kampung Kiren yang berhasil di-identifikasi-kan oleh masyarakat melalui forum musyawarah, sebagaimana dirinci pada sub bab berikut.

4.2. Analisis dan Alternatif Pemecahan Masalah

Analisis ini diperlukan untuk melihat sejauh mana ketersediaan sumber daya mempengaruhi pilihan-pilihan kebutuhan penanganan atas isu/permasalahan yang akan dipecahkan. Analisis pemecahan masalah pada intinya adalah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menentukan skala prioritas atas kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengenali dan menganalisis masalah yang ada di masyarakat, yakni melalui analisis pohon masalah. Metode pohon masalah adalah langkah kegiatan untuk mencari sebab akibat dari berbagai persoalan, yang pada akhirnya akan ditemukan penyebab utamanya.

Banyak kegiatan/proyek selalu dihadapkan pada sejumlah masalah atau bahkan memunculkan masalah baru. Jika semua masalah yang telah teridentifikasi dalam analisa masalah sudah dapat dipecahkan semuanya, karena kegiatan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah itu, artinya tujuan telah tercapai. Kondisi negatif yang ditemukan dalam analisa masalah, akan berubah menjadi
kondisi positif setelah penanggulangan dilakukan. Dengan terjadinya perubahan tersebut, maka hubungannya bukan lagi sebab-akibat seperti halnya analisis masalah, tetapi hubungannya berubah menjadi hubungan apa yang akan dihasilkan.

4.2.1. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

NO.	ISSU/PERMASALAHAN STRATEGIS	POTENSI	KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
1.	Tidak ada ATK	Ada struktur kepengurusan kampung	Penyediaan ATK
2.	Belum tersedia data-data tentang kampung	Ada SDM	Pendataan SDGS dan IDM
3.	Belum tersedianya website Kampung dan data kampung secara online	Pemerintah Kampung	Pembiayaan Kampung Digital
4	Kurangnya Biaya untuk Pemilihan Kepala Kampung Periode 2021-2027	Pemerintah Kampung	Tambahan Anggaran Pemilihan Kepala Kampung
5	Belum ada perlengkapan kantor kampung sehingga aparat tidak bisa bekerja dengan maksimal	Pemerintah kampung,kantor kampung	Pengadaan Mebeler (kursi,meja,lemari,sound system)
6	PKK Belum memiliki Pakain Batik	PKK	Pengadaan Batik PKK

4.2.2. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang Pembangunan Kampung

NO.	ISSU/PERMASALAHAN STRATEGIS	POTENSI	KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
1.	Kantor kampung mengalami kerusakan sehingga aparat kampung tdk bekerja maksimal	Ada bahan lokal Ada tenaga kerja Ada lokaksi	Perehapan Balai Kampung
2	Atribut bagi anak sekolah SD, SMP yang belum ada	Ada siswa	Pengadaan seragam dan alat tulis sekolah
3.	Anak-anak masih berjalan kaki ke sekolah sehingga sering terjadi kecelakaan	Ada anak	Pengadaan angkutan anak sekolah
4	Tidak tersedia fasilitas kesehatan yang memadai	Ada Gedung Ada tenaga medis	Pengadaan pos obat desa
5	Kader Posyandu tidak berjalan dengan baik karenatidak ada insentif	Ada tenaga medis	Insentif kader posyandu
6	Belum memiliki sarana MCK di Balai kampung sehingga orang membuang kotoran sembarangan	Ada bahal lokal Ada tenaga	Pembangunan MCK
7	Banyak anak SD yang putus karena orang tua tidak mampu membiayai	Ada siswa	Beasiswa SD
8	Banyak anak SMP, SMA yang putus karena orang tua tidak mampu membiayai	Ada siswa	Beasiswa SMP,SMA
9	Seni dan budaya lokal semakin hilang akibat tidak ada sanggar untuk proses belajar	Ada para tokoh adat	Pembangunan rumah sanggar budaya
10	Masyarakat menokok sagu masih menggunakan alat tradisional	Ada pohon sagu Ada tenaga	Pengadaan mesin parut sagu
11	Ada petani yang ingin menanam sayur namun tidak ada bibit sayur mayur	Ada tenaga Ada lahan	Pengadaan Bibit Sayur Mayur
12	Ada petani yang masih menggunakan alat tradisional	Ada tenaga Ada lahan	Pengadaan Peralatan Pertanian
13	Tidak ada biaya untuk Publikasi dan informasi (fotocopy,baliho,LPJ,Metrai,penjilidan)	Ada SDM	*Penyediaan dan Publikasi dan informasi*

4.2.3. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung

NO.	ISSU/PERMASALAHAN STRATEGIS	POTENSI	KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
1.	Banyak pemuda/i yang mempunyai bakat di bid olahraga sehingga dapat mengurangi kegiatan negatif	Ada pemuda/i Ada lokasi	Lapangan & Perlengkapan Bola Voly
2.	Banyak pemuda/i yang mempunyai bakat di bidang olahraga sehingga dapat mengurangi kegiatan negatif	Ada pemuda/i Ada lokasi	Seragam Olah raga
3.	Kampung jarang dibersihkan sehingga muncul berbagai penyakit	Ada warga masyarakat	Pembersihan Kampung
4	Warga kurang mendapatkan akses informasi karena tidak ada alat informasi/TV	Ada masyarakat Ada keinginan - mendapatkan informasi	Pengadaan TV Kampung
5	Ada pemuda/i mempunyai bakat dibidang seni namun tidak dapat tersalurkan karena tidak ada alat musik	Ada pemuda/i Ada niat pemuda/I untuk mengembangkan bakat dan minat	Pengadaan alat music (keyboard,gitar)

4.2.4. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

NO.	ISSU/PERMASALAHAN STRATEGIS	POTENSI	KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
1.	Kurang memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga peran masing-masing aparat belum dijalankan secara maksimal.	ada dukungan warga	Belanja traktor bajak tanah
2.	Kurang memahami dalam hal penginputan Siskeudes	ada dukungan warga	Belanja peralatan tani
3.	Belum terbentuknya Bumdes dan penyertaan modal	ada dukungan warga	Belanja tengki semprot
4	Ada ibu-ibu yang punya keterampilan namun belum memahaminya	ada dukungan warga	Belanja Mesin babat rumput
5	Ibu-ibu rumah tangga yang belum memahami dalam mengelola dan menyiapkan gizi keluarga dengan mempergunakan bahan lokal	ada dukungan warga	Belanja sabit
6	Kurang memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga peran dan tugas belum dijalankan secara maksimal.	ada dukungan warga	Belanja dodos
7	Kurang memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga peran dan tugas belum dijalankan secara maksimal.	ada dukungan warga	Belanja mesin
	Belum adanya mesin selip padi sehingga petani terkendala dalam bertani	ada dukungan warga	Belanja mesin selip padi
	Masyarakat masih	ada dukungan	Belanja mesin parut sagu

	menggunakan cara manual	warga	
	Masyarakat masih menggunakan cara manual	ada dukungan warga	Belanja mesin parut kelapa
	Para petani terkendala dalam hal bibit	ada dukungan warga	Belanja pembibitan
	Masyarakat masih menggunakan cara manual	ada dukungan warga	Belanja mensin pengilingan kacang
	Masyarakat terkendala di dana untuk modal usaha	Ada Ibu-Ibu	Bantuan Modal Penjualan pinang dan sayur +kue
	Para pengrajin terkendala dalam modal belanja bahan	Ada Ibu-Ibu	Bantuan Modal Menyulam / kerajinan tangan

4.2.5.Identifikasi dan Analisis Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak

1	**Masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga tidak ada pendapatan saat pandemi covid-19**	**Ada KPM kurang mampu**	**Bantuan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)**
2	**Tidaktersedia peralatan/obat pencegahan Covid-19**	**Ada Masyarakat/warga**	**Penyediaan Dana Covid-19**

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kampung

Dari hasil pengkajian keadaan kampung maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Kampung Kiren yang akan menjadi pedoman didalam menentukan arah kebijakan pembangunan kampung untuk mencapai visi Kampung tahun 2021

NO	BIDANG & KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	**BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KAMPUNG**		
1.1	Penyediaan ATK	Kamp Kiren	1 Paket
1.2	Pendataan SDGS dan IDM	Kamp Kiren	1 Paket
1.3	Pembiayaan Kampung Digital	Kamp Kiren	1 Paket
1.4	Tambahan Anggaran Pemilihan Kepala Kampung	Kamp Kiren	1 Paket
1.5	Pengadaan Mebeler (kursi,meja,lemari,sound system)	Kamp Kiren	1 Paket
1.6	Pengadaan pakaian batik PKK	Kamp Kiren	1 Paket

2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**		
2.1	Perehapan Balai Kampung	Kamp Kiren	1 Paket
2.1.1	Pengadaan seragam dan alat tulis sekolah	Kamp Kiren	1 Paket
2.1.2	Pengadaan angkutan anak sekolah	Kamp Kiren	1 Unit
2.1.3	Pengadaan pos obat desa	Kamp Kiren	1 Paket
2.1.4	Insentif kader posyandu	Kamp Kiren	1 Paket
2.1.5	Pembangunan MCK	Kamp Kiren	1 Unit
2.1.6	Beasiswa SD	Kamp Kiren	1 Paket
1.1.7	Beasiswa SMP,SMA	Kamp Kiren	1 Paket
1.1.8	Pembangunan rumah sanggar budaya	Kamp Kiren	1 Unit
1.1.9	Pengadaan mesin parut sagu	Kamp Kiren	7 Unit
1.1.10	Pengadaan Bibit Sayur Mayur	Kamp Kiren	1 Paket
1.1.11	Penyediaan dan Publikasi dan informasi	Kamp Kiren	1 paket
2	**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT KAMPUNG**		
2.1	Lapangan & Perlengkapan Bola Voly	Kamp Kiren	1 Paket
2.2	Seragam Olah raga	Kamp Kiren	1 Paket
2.3	Pembersihan Kampung	Kamp Kiren	1 Paket
2.4	Pengadaan TV Kampung	Kamp Kiren	1 unit
2.5	Pengadaan alat music (keyboard,gitar)	Kamp Kiren	1 Paket
3	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		
3.1	Belanja traktor bajak tanah	Kamp Kiren	2 Unit
3.2	Belanja peralatan tani	Kamp Kiren	1 Paket
3.3	Belanja tengki semprot + obat	Kamp Kiren	1 Paket
3.4	Belanja Mesin babat rumput	Kamp Kiren	1 Paket
3.5	Belanja sabit + cangkul	Kamp Kiren	1 Paket
3.6	Belanja dodos	Kamp Kiren	1 Paket
3.7	Belanja mesin sensor	Kamp Kiren	2 Unit
3.8	Belanja mesin selip padi	Kamp Kiren	3 unit
3.9	Belanja mesin parut sagu	Kamp Kiren	3 unit
3.10	Belanja mesin parut kelapa	Kamp Kiren	3 unit
3.11	Belanja pembibitan	Kamp Kiren	1 Paket
3.12	Belanja mensin pengilingan kacang	Kamp Kiren	1 Unit
3.13	Bantuan Modal Penjualan pinang dan sayur +kue	Kamp Kiren	1 Paket
4	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT**		
4.1	Bantuan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kamp Kiren	281 KK
4.2	Penyediaan Dana Covid-19	Kamp Kiren	1 Paket

4.2.3 Strategi Pencapaian

Langkah langkah yang di tempuh oleh Kepala Kampung Kiren dalam rangka tercapainya program yang telah di rencanakan antara lain;

1) Menjalin komunikasi yang baik dengan warga masyarakat, sehingga dapat diberdayakan dari sisi biaya, tenaga dan dukungan akan program yang akan, sedang dan telah berjalan.

2) Menjalin komunikasi dengan Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) Kabupaten dan Provinsi dalam upaya penyampaian program ke kampung.

3) Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan/ mendirikan/ membangun usaha di kampungnya.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

5.1 Program Jangka Menengah Kampung

Dari hasil identifikasi masalah dan potensi maka alternatif upaya pemecahan masalah selanjutnya disusun sebagai ranking prioritas dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disepakati bersama.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan urutan/ranking prioritas program pembangunan jangka menengah di Kampung Kiren adalah sebagai berikut :

- Ketersedian Dana
- Kemendesakan
- Kepentingan Umum
- Ketersediaan Bahan
- Kerumitan Teknologi

No.	Harapan 6 Tahun Kedepan	Program	Skala Prioritas
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
1		Penyediaan ATK	Tahun I-VI
2		Pendataan SDGS dan IDM	Tahun I
3		Pembiayaan Kampung Digital	Tahun IV
4		Tambahan Anggaran Pemilihan Kepala Kampung	Tahun I
5		Pengadaan Mebeler (kursi,meja,lemari,sound system)	Tahun III
6		Pengadaan Batik PKK	Tahun III
II.	Bidang Pembangunan Kampung		
1		Perehapan Balai Kampung	Tahun IV
2		Pengadaan seragam dan alat tulis sekolah	Tahun V
3		Pengadaan angkutan anak sekolah	Tahun V
4		Pengadaan pos obat desa	Tahun III
5		Insentif kader posyandu	Tahun V
6		Pembangunan MCK	Tahun IV
7		Beasiswa SD	Tahun V
8		Beasiswa SMP,SMA	Tahun IV
9		Pembangunan rumah sanggar	Tahun VI

No.	Harapan 6 Tahun Kedepan	Program	Skala Prioritas
10		budaya	Tahun VI
11		Pengadaan mesin parut sagu	Tahun IV
12		Pengadaan Bibit Sayur Mayur	Tahun V
		Penyediaan dan Publikasi dan informasi	
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1.		Lapangan & Perlengkapan Bola Voly	Tahun VI
2.		Seragam Olah raga	Tahun VI
3.		Pembersihan Kampung	Tahun III
4.		Pengadaan TV Kampung	Tahun III
5.		Pengadaan alat music (keyboard,gitar)	Tahun V I
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.		Belanja traktor bajak tanah	Tahun I
2.		Belanja peralatan tani	Tahun I
3.		Belanja tengki semprot + obat	Tahun V
4.		Belanja Mesin babat rumput	Tahun VI
5.		Belanja sabit + cangkul	Tahun V
6.		Belanja dodos	Tahun VI
7.		Belanja mesin sensor	Tahun IV-V
8.		Belanja mesin selip padi	Tahun IV
9.		Belanja mesin parut sagu	Tahun IV
10.		Belanja mesin parut kelapa	Tahun IV
11.		Belanja pembibitan	Tahun V
12.		Belanja mensin pengilingan kacang	Tahun V
13.		Bantuan Modal Penjualan pinang dan sayur +kue	Tahun IV
14.		Bantuan Modal Menyulam / kerajinan tangan	Tahun V
15		Belanja mesin jahit	Tahun V
V	Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak		
		Bantuan Langsung Tunai	Tahun I-III
		Penyediaan dana Covid-19	Tahun I-III

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dalam kurun waktu enam tahun yang dimulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2027.

RPJM-Kampung adalah perencanaan tingkat menengah Kampung yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, Bamuskam dan Pemerintah Kampung sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan. RPJM-Kampung secara teknis adalah pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama enam tahun. Pelaksanaan dan keberhasilan RPJM-Kampung adalah tanggung jawab, konstitusional, kultural, dan moral baik masyarakat, Pemerintah, dan Swasta Kampung Kiren

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Kiren tahun 2021-2026 adalah juga pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Kampung (SKPD) yang dalam pelaksanaan operasionalnya melibatkan peran serta masyarakat, maka perlu dibentuk beberapa lembaga berdasar kebutuhan riil dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Kampung dalam rangka implementasi rencana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-Kampung) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPB-Kampung).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Kampung Kiren tahun 2021-2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

Selanjutnya dengan pelaksanaan RPJM-Kampung yang mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama enam tahun, maka hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kampung Kiren, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin secara demokratis.

Kepala Kampung Kiren

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO

DAUD DANIEL SAMAL, S.Pi



LAMPIRAN RPJMK

- Daftar Panjang Masalah
- Matriks RPJMK
- Peta Kampung
- Berita Acara Musrenbang 2021
- Daftar Hadir Musrenbang 2021
- Peraturan Kampung tentang RPJMK

DAFTAR PANJANG MASALAH

Daftar Panjang Program Jangka Menengah

Berdasarkan hasil musyawarah warga telah diidentifikasi dan dilakukan analisis terhadap sejumlah permasalahan yang ada di Kampung Kiren. Hasil analisis yang telah dilakukan menghasilkan daftar panjang altenatif upaya pemecahan masalah sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Daftar Panjang Masalah dan Pemecahan Masalah

No.	Permasalahan	Pemecahan Masalah
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	
1.	Aparat Kampung dan staf tidak bekerja dengan baik karena tidak ada Fasilitas yang memadai	Penyediaan ATK
2.	Kurangnya kelengkapan data Profil	Pendataan SDGS dan IDM
3.	Belum adanya Website Kampung yang menampilkan data secara online	Pembiayaan Kampung Digital
4.	Kirangnya anggaran dalam pemilihan Kepala Kampung	Tambahan Anggaran Pemilihan Kepala Kampung
5.	Aparat kampung tidak bisa bekerja dengan maksimal Karen Kurangnya meleair	Pengadaan Mebeler (kursi,meja,lemari,sound system)
6.	Aparat kampung tidak bisa melaksanakan proses Administrasi dengan baik	Pengadaan Batik PKK
II.	Bidang Pembangunan Kampung	
1	Balai Kampung telah mengalami banyak kerusakan bangunan	Perehapan Balai Kampung
2	Butuhnya bantuan untuk para siswa/i	Pengadaan seragam dan alat tulis sekolah
3	Anak sekolah banyak yang mengalami kecelakaan	Pengadaan angkutan anak sekolah
4	Kurangnya persediaan obat di kampung	Pengadaan pos obat desa
5	Kurangnya insentif kader	Insentif kader posyandu
6	Tidak ada Bangunan MCK di Kantor Kampung	Pembangunan MCK
7	Perlu adanya bantuan untuk mahasiswa miskin/berprestasi	Beasiswa SD
8	Perlu adanya bantuan untuk mahasiswa miskin/berprestasi	Beasiswa SMP,SMA
9	Belum adanya wadaah untuk kesenian masyarakat	Pembangunan rumah sanggar budaya
10	Masyarakat masih menggunakan cara manual dalam mengolah sagu	Pengadaan mesin parut sagu
11	Masyarakat kesulitan dalam penyediaan bibit	Pengadaan Bibit Sayur Mayur
12	Kurangnya pendanaan untuk penyusunan RPJMK, RKPK, APBK	Penyediaan dan Publikasi dan informasi
III	Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung	
1	Tidak adanya fasilitas untuk anak muda peminat volly	Lapangan & Perlengkapan Bola Voly

No.	Permasalahan	Pemecahan Masalah
2	Pemuda masih mengalami kendala terkait seragam	Seragam Olah raga
3	Kampung dengan penduduk yang banyak perlu adanya pembersihan 1 bulan 3 x	Pembersihan Kampung
4	Kurangnya fasilitas dalam kantor kampung	Pengadaan TV Kampung
5	Para pemuda peminat seni music belum memiliki alat musik	Pengadaan alat music (keyboard,gitar)
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat kampung	
1	Masyarakat masih mengalami kendala dalam mengolah tanah lahan/kebun	Belanja traktor bajak tanah
2	Petani belum memiliki alat yang memadai untuk melakukan pekerjaan tani	Belanja peralatan tani
3	Banyak hama yang masuk di kebun warga	Belanja tengki semprot + obat
4	Rumput cepat tinggi di sekitar rumah waga berpotensi ular masuk kedalam rumah	Belanja Mesin babat rumput
5	Masyarakat kekurangan alat dalam mengolah kebun	Belanja sabit + cangkul
6	Masyarakat kekurangan alat dalam mengolah kebun	Belanja dodos
7	Masyarakat kekurangan alat untuk membuka lahan pertanian	Belanja mesin sensor
8	Tidak ada mesin penggilingan padi di dalam kampung	Belanja mesin selip padi
9	Masyarakat masih menggunakan alat tradisional dalam mengolah/memanen sagu	Belanja mesin parut sagu
10	Masyarakat masih menggunakan alat tradisional dalam mengolah kelapa hasil kebun	Belanja mesin parut kelapa
11	Masyarakat masih kekurangan bibin untuk kebutuhan pertanian	Belanja pembibitan
12	Masyarakat masih menggunakan cara tradisional dalam mengupas kulit kacang	Belanja mensin pengilingan kacang
13	Kurangnya modal masyarakat/tidak mampu membeli barang untuk di jual kembali	Bantuan Modal Penjualan pinang dan sayur +kue
14	Tidak ada bantuan untuk pengrajin	Bantuan Modal Menyulam / kerajinan tangan
15	Tidak ada alat jahit sehingga masyarakat harus ke kota	Belanja mesin jahit
V	Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak	
1	Banyaknya warga yang tidak mampu	Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2	Butuhnya pendanaan untuk penanggulangan covid-19	Penyediaan Dana Covid-19

MATRIKS RPJMK

RANCANGAN RPJM KAMPUNG / MATRIK

TAHUN : 2021-2027

KAMPUNG : KIREN
DISTRIK : BONGGO
KABUPATEN : SARMI
PROVINSI : PAPUA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Penyediaan ATK	Kamp. Kiren	1 Paket	Kantor kampung	1	1	1	1	1	1	100.000.000	DD	✓		
				Pendataan SDGS dan IDM	Kamp. Kiren	1 Paket	Kantor kampung	1	0	0	0	0	0	20.000.000	DD	✓		
				Pembiayaan Kampung Digital	Kamp. Kiren	1 Paket	Kantor kampung	0	0	0	1	0	0	3.000.000	DD	✓		
				Tambahan Anggaran Pemilihan Kepala Kampung	Kamp. Kiren	8 Unit	Aparat kampung	1	0	0	0	0	0	30.000.000	DD	✓		
				Pengadaan Mebeler (kursi,meja,lemari,sound system)	Kamp. Kiren	1 Paket	Kantor kampung	0	0	1	0	0	0	30.000.000	DD	✓		
				Pengadaan Batik PKK	Kamp. Kiren	1 Paket	PKK	0	0	1	0	0	0	70.000.000	DD	✓		
Jumlah Per Bidang 1														**253.000.000**				
2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perehapan Balai Kampung	Kamp. Kiren	1 Paket	Kantor kampung	0	0	0	1	0	0	200.000.000	DD	✓		
				Pengadaan seragam dan alat tulis sekolah	Kamp. Kiren	1 Paket	Kantor kampung	0	0	0	0	1	0	10.000.000	DD	✓		
				Pengadaan angkutan anak sekolah	Kamp. Kiren	1 Unit	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	200.000.000	DD	✓		
				Pengadaan pos obat desa	Kamp. Kiren	1 Paket	Masyarakat	0	0	1	0	0	0	50.000.000	DD	✓		
				Insentif kader posyandu	Kamp. Kiren	1 Paket	Kader	0	0	0	0	1	0	100.000.000	DD	✓		
				Pembangunan MCK	Kamp. Kiren	1 Unit	Kantor kampung	0	0	0	1	0	0	200.000.000	DD	✓		
				Beasiswa SD	Kamp. Kiren	1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	20.000.000	DD	✓		
				Beasiswa SMP,SMA	Kamp. Kiren	1 Paket	Masyarakat	0	0	0	1	0	0	40.000.000	DD	✓		
				Pembangunan rumah sanggar budaya	Kamp. Kiren	1 Unit	Masyarakat	0	0	0	0	0	1	300.000.000	DD	✓		
				Pengadaan mesin parut sagu	Kamp. Kiren	7 Unit	Masyarakat	0	0	0	0	0	1	35.000.000	DD	✓		
				Pengadaan Bibit Sayur Mayur	Kamp. Kiren	1 Paket	Masyarakat	0	0	0	1	0	0	30.000.000	DD	✓		
				Penyediaan dan Publikasi dan informasi	Kamp. Kiren	1 paket	Kantor kampung	0	0	0	0	1	0	50.000.000	DD	✓		
														1.235.000.000				
3	Pembinaan Masyarakat Kampung		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Lapangan & Perlengkapan Bola Voly	Kamp. Kiren	1 Paket	Karang Taruna	0	0	0	0	0	1	150.000.000	DD	✓		
				Seragam Olah raga	Kamp. Kiren	1 Paket	Karang Taruna	0	0	0	0	0	1	20.000.000	DD	✓		
				Pembersihan Kampung	Kamp. Kiren	1 Paket	Aparat Kampung	0	0	1	0	0	0	300.000.000	DD	✓		
				Pengadaan TV Kampung	Kamp. Kiren	1 unit	Kantor Kampung	0	0	1	0	0	0	10.000.000	DD	✓		
				Pengadaan alat music (keyboard,gitar)	Kamp. Kiren	1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	0	1	30.000.000	DD	✓		
Jumlah pembidangan 3														510.000.000				

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Belanja traktor bajak tanah		2 Unit	Masyarakat	1	0	0	0	0	0	50.000.000	DD	✓		
				Belanja peralatan tani		1 Paket	Masyarakat	1	0	0	0	0	0	100.000.000	DD	✓		
				Belanja tengki semprot + obat		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	200.000.000	DD	✓		
				Belanja Mesin babat rumput		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	0	1	20.000.000	DD	✓		
				Belanja sabit + cangkul		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	100.000.000	DD	✓		
				Belanja dodos		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	0	1	100.000.000	DD	✓		
				Belanja mesin sensor		2 Unit	Masyarakat	0	0	0	1	1	0	100.000.000	DD	✓		
				Belanja mesin selip padi		3 unit	Masyarakat	0	0	0	1	0	0	200.000.000	DD	✓		
				Belanja mesin parut sagu		3 unit	Masyarakat	0	0	0	1	0	0	90.000.000	DD	✓		
				Belanja mesin parut kelapa		3 unit	Masyarakat	0	0	0	1	0	0	90.000.000	DD	✓		
				Belanja pembibitan		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	200.000.000	DD	✓		
				Belanja mensin pengilingan kacang		1 Unit	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	50.000.000	DD	✓		
				Bantuan Modal Penjualan pinang dan sayur +kue		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	1	0	0	30.000.000	DD	✓		
				Bantuan Modal Menyulam / kerajinan tangan		1 Paket	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	30.000.000	DD	✓		
				Belanja mesin jahit		2 Unit	Masyarakat	0	0	0	0	1	0	25.000.000	DD	✓		
5	Penanganan Becana Darurat dan Mendesak			Bantuan Langsung Tunai (BLT)		281 KK	Masyarakat	1	1	1	0	0	0	3.034.800.000	DD	✓		
				Penyediaan Dana Covid-19		1 Paket	Masyarakat	1	1	1	0	0	0	322.000.000	DD	✓		
														4.741.800.000	DD			
														6.739.800.000				

Kiren, 22 Juli 2021
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Kampung Kiren

ANDI HARTANTO

Mengetahui
Kepala Kampung Kiren

DANIEL DANIEL SANA, S.Pt

PETA KAMPUNG

PETA KAMPUNG KIREN

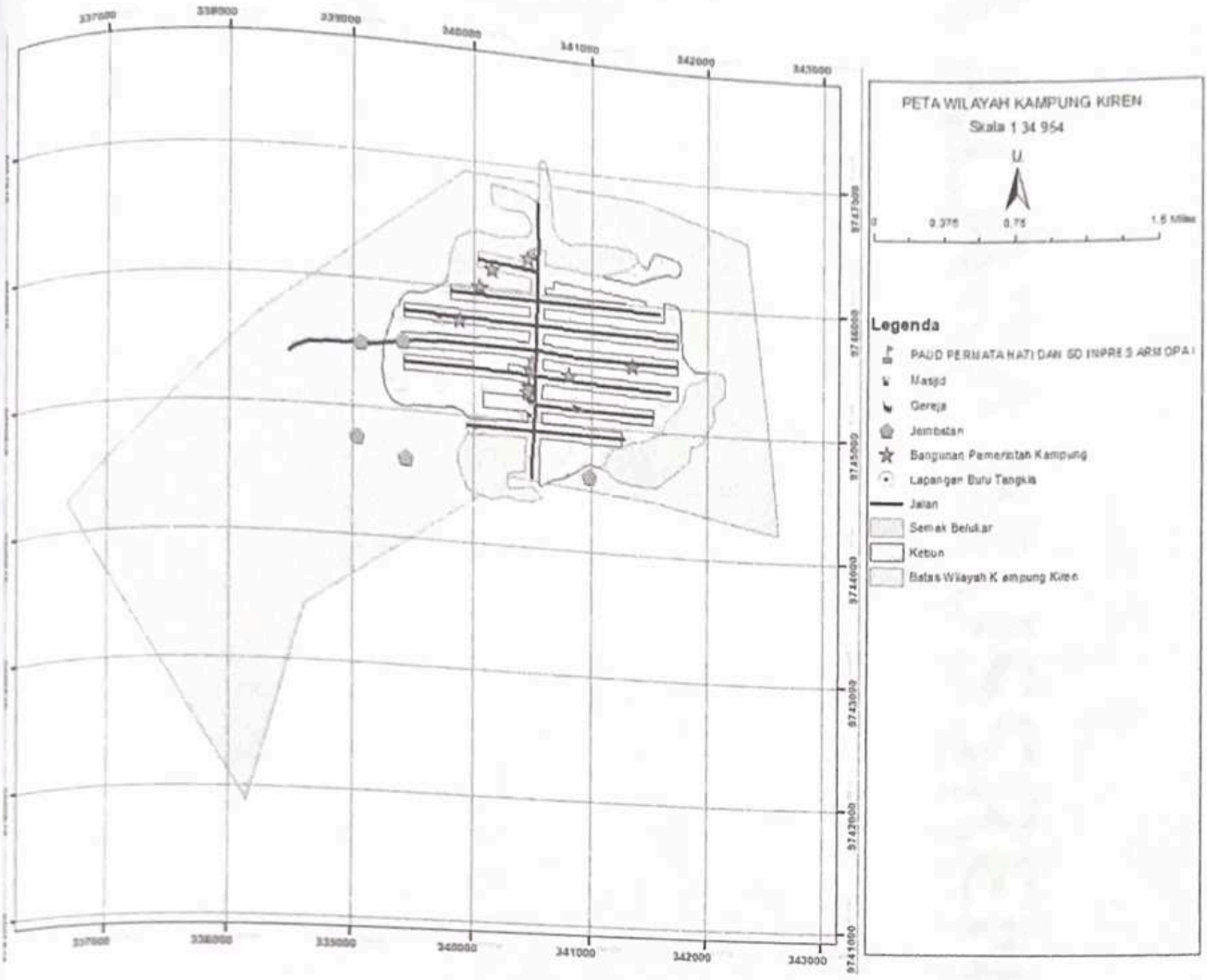

BERITA ACARA MUSSRENBANG 2021

BERITA ACARA MUSRENBANG
PENYUSUNAN RPJMK TAHUN ANGGARAN 2021-2027
KAMPUNG KIREN DISTRIK BONGGO

Berkaitan dengan penyusunan RJMKK Tahun Anggaran 2021-2027 pada Kampung Kiren Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Selasa, 21 Juli 2021
Jam : 09.00 s/d 13.00 WIT
Tempat : Balai Kampung Kiren

telah diadakan acara musyawarah Kampung yang dihadiri oleh kepala Kampung, unsur perangkat Kampung, Bamuskam, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Materi atau topik
   1. Penjelasan maksud dan tujuan Musrembang Kampung
   2. Pencermatan dan Pembahasan RPJM Kampung.
   3. Penetapan RPJMK Kampung

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber :
   Pimpinan Rapat : Kepala Kampung Kiren
   Sekretaris : Sekretaris Kampung Kiren
   Nara Sumber :
   1. DAUD DANIEL SAMAI, S.Pi (KepalaKampung)
   2. Silas Bit-Bit (Ketua Bamuskam)
   3. Oskar Wabia (Pendamping)
   4. Yosep Mosa (TAPMD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan dan Penetapan RPJMK Kampung yaitu :

1. Menyetujui dan Menetapkan Dokumen RPJMK Tahun 2021-2027
2. Dokumen RPJMK akan diperkuat dengan Peraturan Kampung (Perkam)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab guna menjadi pedoman bagi Pelaksanaan Program Pembangunan di kampung.

Kiren, 22 Julir 2021

Ketua Bamuskam	Kepala Kampung Kiren
SILAS BIT-BIT	**DAUD DANIEL SAMAI, S.Pi**

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari peserta Musrenbang Kampung

No.	Nama	Alamat	TandaTangan
1	Victor. Samay.	Kiren	
2	Onesimus Dawes	Kiren	
3	Degius Dawes	Kiren	
4	ARNOLD. Sanonar	Kiren	
5	Riki G. Tomkan	Kiren	

Daftar Hadir
Musrembang Kampung Kiren
Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Alamat	TandaTangan
1	Yalmo.	Kepala.	RT 04.	[signature]
2	SANUKI	RT 04		[signature]
3	SYAIFULLAH.	RT. 06.	Jlr. 4. B.	[signature]
4	K. HEATUBUN	RT 05.	JALUR 3 7.	[signature]
5	YERMIAS. Sanopan	RT. 001	JALUR 1 7.	[signature]
6	NAHANG-IN	RT. 12/03	[signature]	
7	Wantono	RW. 01	[signature]	
8	JOHAN SHAH	— " —	[signature]	
9	IMAM SYAFI'I	WARGA	JALUR 4.	[signature]
10	RAHEL BETSI	Warga	JLR 2	[signature]
11	MARCE. W	Warga	JLR 1	[signature]
12	AHMAD-A/Cebas	Warga	JLR III-B	[signature]
13	NURIADA	RT	10	[signature]
14	SUTRISNO	WARGA	Jlur (4)	[signature]
15	MADE	WARGA	JALUR (6)	[signature]
16	Shandry	Karang Taruna.	Jalur 4.	[signature]
17	PILEMON. TOMKAU	Warga	Jalur 2	[signature]
18	ADOLF TOMKAU	KETUA pemuda	Jalr 1	[signature]
19	BENONI. BASWA	WARGA	JALUR. 2 7	[signature]
20	DEGIUS-DAMES	ODOWAFI	JALUR. 1 7	[signature]
21	RIKI - TOMKAU	— " —		[signature]

22	IBAS MULYAWAN.	Sek Bamuskam	RT. 03	[signature]
23	ARNOLD. SAWANAR	Kaur UMUM	RT. 01	[signature]
24	Sigit Sumarno	Kaur pembangunan	RT - 04	[signature]
25	Degius Dawes	TOKO ADAT	RT 01	[signature]
26	NYOMAN SUMARTO	RT 11	JLR 7 BARAT	[signature]
27	NURINA	WARGA	JLR 2 T	[signature]
28	NORCE. DAWES	WARGA.	Jlr I	
29	MURSINA.	WARGA	JLR IV B	
30	MARTHA. DAWES	WARGA	Jlr IV T	
31	WARGINA.	WARGA	Jlr IV B.	
32	Sri suparlia	Warga	Jlr IV B	[signature]
33	DEWI SEWI.	Warga.	Jlr 4. B	[signature]
34	Musirah	Warga	Jlr 4 B.	[signature]
35	KHOTIJAH	Warga	Jlr. 4 B	[signature]
36	RONNI. D. SAMAY	Toko Masyarakat	Jlr. 2 T	[signature]
37	M. WANANDA	KET. RT-07	JLR 4 T	[signature]
38	BURHAN	WARGA	JLR 4 B	[signature]
39	JUHRAH	WARGA	JLR 7 T	[signature]
40	ARIS	WARGA	JLR 3 B	
41	IBU. DOLFINA OYAITOU	KADER	Jlr II TMR	[signature]
42	IBU. ADONIA DAWES	WARGA	Jlr II BRT	[signature]
43	Bambang Hawan	KBAMUSKAM		[signature]
44	DAVID DANIEL SAMAI	Kepala Kampung	Jlr. 01 BRT	[signature]
45				
46				
47				

48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

Kiren, 15 Juli 2021

KEPALA KAMPUNG KIREN

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG
KIREN
DISTRIK BONGGO

DAUD DANIEL SAMAI, S.Pi

PERATURAN KAMPUNG TENTANG RPJMK

PERATURAN KAMPUNG KIREN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJMK)

KIREN TAHUN 2021 - 2027

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan progam tahunan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung guna memberikan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan secara bertahap dalam tiap tahun;

b. bahwa , sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2021 - 2027);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun .....
Nomor .....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KIREN
Dan
KEPALA KAMPUNG KIREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG KIREN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG KIREN TAHUN 2021-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampug, Pelaksanaan Pembanguna Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pembedayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung;
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
5. Badan Musyawrah Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokaratis;
6. Musyawrah Kampung adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Kampung, Pemerintah Kampung, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Musyawarah Permusyawaratan Kampung adalah musyawarah antanra Badan Musyarawah Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Swadaya Masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskan dan Kepala Kampung;
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat (RPJMK) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah Kebijakan Pembangunan Kampung, arah Kebijakan Keuangan Kampung, Kebijakan Umum, Program dan Kewilayahan, disertai dengan Rencana Kerja;
11. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat (RKPK) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMK yang memuat rancangan kerangka ekonomi

kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat denan mengacu kepada RKPK;

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kampung bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;
13. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan social, karifan lokal, ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung;
14. Musyawarah Perencanaan Pemabangunan Kampung yang selanjutnya disingkat (MUSRENBANG KAMPUNG) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung (pihak berkepentingan untuk mengatasi permaslahan kampung dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan di kampung, tahunan dan 1 (satu) tahunan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kampung dan Bamuskam, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
16. Dana Desa/Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemeritahankampug, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung;
17. Alokasi Dana Kampung, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 2

1. Perencanaan Pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi :
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
   b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kampung, merupakan Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampug sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 3

1. Dalam rangka perencanaan pembanguna kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), pemerintah kampung melaksanakan tahapan yang meliputi:
   a. Penyusunan RPJM Kampung; dan
   b. Penyusunan RKP Kampung.
2. RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Janka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung;
3. RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

Pasal 4

1. Rancangan RPJM Kampung memuat visi dan misi Kepala Kampung, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Peneyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

2. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain ;

   a. Penetapan dan penegasan batas kampung;
   b. Pendataan kampung;
   c. Penyusunan tata ruang kampung;
   d. Penyelenggaraan musyawarah kampung;
   e. Pengelolaan informasi kampung;
   f. Penyelenggaraan perencanaan kampung;
   g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
   h. Penyelenggaraan kerjasama antar kampung;
   i. Pembangunan sarana dan prasrana kantor kampung;
   j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.

3. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung antara lain :

   a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kampung antara lain :
      1. Jalan pemukiman;
      2. Jalan Kampung antar pemukiman ke wilayah pertanian;
      3. Lingkungan permukiman masyarakat kampung; dan
      4. Infrastruktur kampung lainnya sesuai kondisi kampung.
   b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
      1. Air bersih berskala kampung;
      2. Sanitasi lingkungan;
      3. Pelayanan kesehatan kampung seperti Pos Yandu; dan
      4. Sarana dan prasrana kesehatan lainnya sesuai kondisi kampung.
   c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
      1. Taman bacaan masyarakat;
      2. Pendidikan anak usia dini;

3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi kampung.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
   1. Pasar kampung;
   2. Pembentukan dan pengembangan BUM kampung;
   3. Penguatan modal BUM kampung;
   4. Pembukaan lahan pertanian;
   5. Kandang ternak
   6. Instalasi biogas;
   7. Mesin pakan ternak; dan
   8. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi kampung.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
   1. Penghijauan;
   2. Perlindungan mata air;
   3. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
   4. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
   a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
   b. penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban;
   c. pembinaan kerukunan umat beragama;
   d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
   e. pembinaan lembaga adat;
   f. pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat; dan
   g. kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.

5. Bidang Pembardayaan Masyarakat antara lain :
   a. pelatihan usha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
   b. pelatihan tehnologi teapat guna;
   c. pendidikan pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala kampung, perangkat kampung dan badan musyawarah kampung;
   d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
      1. kader pemberdayaan masyarakat kampung;
      2. kelompok usha ekonomi produktif;
      3. kelompok perempuan;

4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi kampung.

BAB IV

PENYUSUNAN RKP KAMPUNG

Pasal 5

1. Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung;
2. RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampug sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung bulan Juli tahun berjalan;
4. RKP Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
5. RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 6

1. Kepala Kampung menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung.
2. Penyusunan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
   a. Penyusunan perencanaan pembangunan kampung melalui musyawarah kampung;
   b. Pembentukan tim penyusun RKP Kampung;
   c. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarsan program/kegiatan masuk ke kampung;
   d. Pencermatan ulang dokumen kampung;
   e. Penyusunan rancangan RKP Kampung;
   f. Penyusunan RKP Kampung melalui musyawrah perencanaan pembangunan kampung;
   g. Penetapan RKP Kampung;
   h. Perubahan RKP Kampung; dan
   i. Pengajuan daftar usulan RKP Kampung.

BAB V

APB KAMPUNG

Pasal 7

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung terdiri atas :
   a. Pendapatan Kampung;
   b. Belanja Kampung; dan
   c. Pembiayaan Kampung.
2. Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
3. Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
4. Pembiayaan sebagimana dimaksud ayat (1) huruf c diklasifikasikan menrut kelompok dan jenis.

Pasal 8

Pendapatan kampung

1. Pendapatan Kampung sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
2. Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri atas kelompok :
   a. Pendapatan asli kampung;
   b. Transfer; dan
   c. Pendapatan lain-lain.
3. Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
   a. Hasil usaha;
   b. Hasil Aset;
   c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
   d. Lain – lain pendapatan asli kampung.
4. Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a anatara lain hasil BUMKampung, tanah kas kampung.
5. Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain, pasar kampung, iuran air bersih.
6. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang aynag dinilai dengan uang.
7. Lain – lain pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan kampung.

Pasal 9

1. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
   a. Dana Desa;
   b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
   c. Alokasi Dana Desa (ADD);
   d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
   e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
2. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum da khusus.
3. Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
4. Kelompok pendapatan lain – lain sebagimana dimaksud pada pasal (8) ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
   a. Hibah dari sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
   b. Lain – lain pendapatan kampung yang sah.

Pasal 10

Belanja kampung

1. Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
2. Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 11

1. Klasifikasi Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
   d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
   e. Belanja Tak Terduga.

2. Kelompok belanja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKPKampung.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
    a. Pegawai;
    b. Barang dan jasa; dan
    c. Modal.

Pasal 12

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    a. Alat tulis kantor;
    b. Benda pos;
    c. Bahan/material;
    d. Pemeliharaan;
    e. Cetak/penggandaan;
    f. Sewa kantor kampong;
    g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
    h. Makanan dan minuman rapat;
    i. Pakaian dinas dan atributnya;
    j. Perjalanan dinas;
    k. Upah kerja;
    l. Honorarium narasumber/ahli;
    m. Operasional pemerintah kampung;
    n. Operasional Bamuskam;
    o. Insentif Rt/Rw; dan
    p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
3. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenagan kampung.

BAB VI

Musyawarah kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan kampung

Pasal 13

1. Badan musyawarah kampung memnyelenggarakan musyawarah kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan kampung.
2. Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bualan Desember tahun anggaran berikutnya.
3. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
   a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala kampung; dan
   b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala kampung dengan disaksikan oleh Bamuskam dan unsur masyarakat kampung.
4. Kepala kampung menyampaikan kepada Bamuskam tentang laporan pelaksanaan pembangunan kampung berdasarkan laporan akhir pelaksan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pelstarian dan pemafaatan hasil kegiatan Pembangunan Kampung.

Pasal 14

1. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan kampung dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan kampung.
2. Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
   a. Melakuka pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
   b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan kampung; dan
   c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Kiren Tahun 2021 - 2027 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 16

Peraturan Kampung Kiren ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kiren

Pada tanggal 22 Juli 2021

KEPALA KAMPUNG KIREN

(DAUD DANIEL SAMAI, S.Pi)

Diundangkan di Kiren

Pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

ANDI HARTANTO

Lembaran Kiren No: 01 Tahun 2021